

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BONTANG TAHUN 2014-2018

Sudarlan¹, Rahmawati Fitriana², Rezky Dayanti Mujiato³
sudarlan@polnes.ac.id¹, fitrianarahmawati1231@gmail.com², rezkydayantim@gmail.com³
¹²³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda
¹²³ Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Samarinda

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan pendapatan daerah kota Bontang periode 2014-2018. Alat analisis yang digunakan adalah pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas pajak daerah, dan derajat kontribusi BUMD serta pertumbuhan belanja, belanja operasi, belanja modal, dan efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah kota Bontang secara umum mengalami peningkatan. Walaupun demikian kinerja keuangan daerah kota Bontang dilihat dari pendapatan secara umum masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,69% , rasio derajat desentralisasi masih kurang dikarenakan persentase sebesar 13,37%, rasio kemandirian daerah rendah sekali dikarenakan persentase sebesar 16,26%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dikarenakan persentase sebesar 87,18%, rasio efektifitas pajak daerah efektif dikarenakan persentase 107,55%, dan derajat kontribusi BUMD telah berkontribusi dikarenakan persentase 3,23% dan belanja daerah kota Bontang secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -2,02, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi dikarenakan persentase sebesar 71,15%, rasio belanja modal terhadap total belanja tidak mendominasi dikarenakan persentase sebesar 28,23%, dan rasio efisiensi belanja efisien dikarenakan persentase sebesar 84,87%.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstract.

This study aims to determine the financial performance of local revenue of Bontang City for the period 2014-2018. The analytical tools used are revenue growth, the degree of decentralization, regional independency, the regional financial dependency, the effectiveness of local taxes, and the degree of contribution of the BUMD contributions as well as spending growth, operating expenditure, capital expenditure, and expenditure efficiency. The results showed that the financial performance of Bontang's regional income in general had increased. Even so the regional financial performance of the Bontang city in terms of revenue in general is still not good. This is evidenced by the average growth of income experiencing negative growth of -1.69%, the degree of decentralization ratio is still lacking due to a percentage of 13.37%, the ratio of regional independence is very low due to a percentage of 16.26%, the ratio of regional financial dependence is very high due to a percentage of 87.18%, the ratio of effectiveness of effective local tax due to a percentage of 107.55%, and the degree of contribution of BUMD has contributed due to the percentage of 3.23% and regional expenditure in the city of Bontang in general can be said to be good. This is evidenced by the average growth of expenditure experienced a negative growth of -2.02, the ratio of operating expenditure to total expenditure dominated because of a percentage of 71.15%, the ratio of capital expenditure to total expenditure did not dominate due to a percentage of 28.23%, and efficient shopping efficiency ratio due to a percentage of 84.87%.

Keywords: Financial Performance, Revenue and Regional Spending

PENDAHULUAN

Di era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan pola pembangunan dari pola pertumbuhan menuju pola pemerataan pembangunan secara lebih berimbang. Perubahan pola ini diwujudkan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur sebagai pedoman yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Sosial Ekonomi dan Bisnis



Nomor 25 Tahun 1999. Otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Kondisi seperti ini, peran investasi swasta dan perusahaan daerah diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Kinerja kota Bontang menunjukkan perubahan yang cukup baik dari segi pelayanan, penataan kota, dan pembangunan. Kinerja keuangan kota Bontang tahun 2011–2015 menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan kota Bontang periode selanjutnya. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatuhan dan rasa keadilan. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam APBD, karena besaran kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah dan pembangunan. Pendapatan daerah kota Bontang secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum pertumbuhan realisasi pendapatan kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian dibandingkan dengan periode awal tahun 2011, Pendapatan daerah kota Bontang selama 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata 1.8% per tahun. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan ini dikarenakan dampak dari kondisi ekonomi makro daerah maupun nasional, yang selama periode tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami tekanan karena menurunnya harga-harga komoditas dunia, seperti menurunnya harga minyak dunia, yang diikuti oleh menurunnya harga gas, batu bara dan komoditi strategis lainnya. (www.bontangkota.go.id).

Kemampuan pemerintah daerah kota Bontang dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian,2006:274). Pemerintah daerah memerlukan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai cara kerja anggaran pendapatan dan Sosial Ekonomi dan Bisnis



belanja daerah. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182). Pengukuran kinerja merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan dalam merealisasikan pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan pengukuran kinerja tersebut dijadikan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode mendatang. Kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dari cara menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan dalam mencari data mengenai kinerja keuangan daerah kota Bontang untuk diteliti. Metode wawancara sendiri untuk mengetahui penyebab yang timbul dari teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kota Bontang berupa data target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kota Bontang tahun 2014-2018. Penulis juga melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai penyebab peningkatan dan penurunan pendapatan daerah kota Bontang tahun 2014-2018. Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada salah satu kasubbid bidang pendapatan dikantor Bapenda kota Bontang.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan secara positif dapat dikatakan kinerja keuangan pendapatan kecenderungannya meningkat. Sedangkan pertumbuhan secara negatif dapat dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik (Mahmudi, 2016:137).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pend.Tahun } t - \text{Pend.Tahun } (t-1)}{\text{Pend.Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Kriteria Penilaian Pertumbuhan Pendapatan

Persentase	Tingkat Pertumbuhan
>0	Positif
<0	Negatif

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

2. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian derajat desentralisasi daerah menurut Tim Fisipol UGM dan Litbang Depdagri (1991) dalam Bisma (2010:78), adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

Persentase	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

(Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma: 2010))

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2014:267):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pola hubungan yang digunakan untuk mengukur Rasio Kemandirian Keuangan sebagai berikut:



Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
0-25%	Rendah Sekali
25-50%	Rendah
50-75%	Sedang
75-100%	Tinggi

(Sumber: Halim (2014:267))

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2016:140).

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Tim Fisipol UGM dan Litbang Degdagri (1991) dalam Bisma (2010,77), adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penelitian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Tingkat Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Tinggi

(Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma: 2010))

4) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak dianggap efektif apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016:142).

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 5. Kriteria Penelitian Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Tingkat Efektifitas
>100	Efektif
<100	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

5) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016:143). Jika rasio ini menunjukkan angka diatas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Penelitian Derajat Kontribusi BUMD

Persentase	Tingkat Derajat Kontribusi BUMD
>0	Berkontribusi
<0	Tidak Berkontribusi

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

3. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2016:158).

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t =$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Persentase	Tingkat Pertumbuhan
>0	Positif
<0	Negatif

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

2) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent). Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2016:162).

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Penelitian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Persentase	Tingkat Pertumbuhan
0-60	Tidak Mendominasi
60-90	Mendominasi

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

3) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal merupakan belanja yang memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, selain itu juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintahan daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2016:162).

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 9. Kriteria Penelitian Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Persentase	Tingkat Pertumbuhan
0-60	Tidak Mendominasi
60-90	Mendominasi

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016:164).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kriteria Penelitian Efisien Belanja Daerah

Persentase	Tingkat Pertumbuhan
>100	Tidak Efisien
<100	Efisien

(Sumber: Mahmudi, 2016 (data diolah, 2020))

PEMBAHASAN

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah digunakan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Berikut adalah tabel hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan:

Tabel 11. Perhitungan Pertumbuhan pendapatan daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Tahun t (Rp)	Pendapatan Tahun t-1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Kriteria Kemampuan
2014	1.455.043.424.236	1.409.772.375.148	3,21%	Positif
2015	1.352.095.367.932	1.455.043.424.236	-7,08%	Negatif
2016	1.203.633.625.194	1.352.095.367.932	-10,98%	Negatif
2017	1.060.400.315.665	1.203.633.625.194	-11,90%	Negatif
2018	1.254.426.657.886	1.060.400.315.665	18,30%	Positif
Rata-rata			-1,69%	Negatif

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan perhitungan Tabel 11, rasio pertumbuhan pendapatan daerah kota Bontang pada tahun 2014 kriteria kemampuan positif karena persentase sebesar 3,21, namun ditahun 2015, 2016, dan 2017 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan persentase angka sebesar -7,08%, -10,98%, dan -11,90%



mengalami pertumbuhan Negatif, namun ditahun 2018 terjadi kenaikan dikarenakan presentase angka 18,30% mengalami pertumbuhan positif. Rasio pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2017 yaitu -11,90%. Menurut Mahmudi (2016) jika terjadi pertumbuhan secara negati dapat dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan. Dilihat secara rata-rata keseluruhan, kinerja keuangan pendapatan kota Bontang mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif dikarenakan rata-rata presentase mencapai angka -1,69%. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) dan Putri (2018) memberikan hasil bahwa secara umum pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dikarenakan mengalami pertumbuhan positif

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk membandingkan jumlah dari Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan pendapatan dan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah sudah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Berikut adalah tabel hasil perhitungan derajat desentralisasi:

Tabel 12. Perhitungan Derajat Desentralisasi daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Kemampuan
2014	160.367.872.158	1.455.043.424.236	11,02	Kurang
2015	142.424.180.608	1.352.095.367.932	10,53	Kurang
2016	170.123.811.101	1.203.633.625.194	14,13	Kurang
2017	169.077.548.653	1.060.400.315.665	15,94	Kurang
2018	199.483.395.953	1.254.426.657.886	15,90	Kurang
Rata-rata			13,37	Kurang

(Sumber : BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 12 hasil perhitungan derajat desentralisasi mengalami peningkatan hampir setiap tahun namun jika dari rata-rata persentase pemerintah daerah masih kurang mampu menyelenggarakan desentralisasi. Ditahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 10,53%. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 15,94%, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 9,87%. Berdasarkan skala interval kemampuan daerah menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 penilaian pada tahun 2014-2018 dapat dikatakan kurang, dikarenakan rasio berada diantara angka 10,01% – 20,00%. Hasil perhitungan derajat desentralisasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kota Bontang kurang mampu menyelenggarakan desentralisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata tingkat desentralisasi sebesar 13,37%. Selain itu, juga dikuatkan oleh pernyataan salah seorang kasubbid kantor Bapenda yang menyatakan bahwa “Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Di kota Bontang kontribusi PAD masih relatif lebih kecil, karena masih banyak potensi yang belum di gali, dan ada juga pajak yang



tidak bisa dipungut. Contohnya Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame (khususnya Produk Rokok), Pajak Air Bawah Tanah (Izinnya dikeluarkan oleh Provinsi). Dari sisi ini Sehingga kota Bontang dianggap masih kurang maksimal dalam menyelenggarakan desentralisasi". Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) dan Ekasari (2018) memberikan hasil bahwa pemerintah daerah masih kurang bisa menyelenggarakan desentralisasi daerah dikarenakan pendapatan asli daerah yang masih rendah.

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio kemandirian daerah:

Tabel 13. Perhitungan Rasio Kemandirian daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Sumber Pendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan
2014	160.367.872.158	1.212.180.697.143	13,23%	Rendah Sekali
2015	142.424.180.608	1.178.698.695.378	12,08%	Rendah Sekali
2016	170.123.811.101	1.008.093.250.699	16,88%	Rendah Sekali
2017	169.077.548.653	853.074.667.954	19,82%	Rendah Sekali
2018	199.483.395.953	1.034.520.689.154	19,28%	Rendah Sekali
Rata-rata			16,26%	Rendah Sekali

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah,2020))

Berdasarkan Tabel 13 mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di kota Bontang masih rendah sekali dikarenakan rata-rata persentase 16,26% dalam hal ini pemerintah masih belum mampu membiayai sendiri kegiatannya. Walaupun mengalami peningkatan ditahun 2016 sebesar 16,88% dan 2017 sebesar 19,82% pemerintah juga masih belum mampu membiayai kegiatannya sendiri. Penurunan terjadi kembali ditahun 2018 sebesar 19,28% . Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah kota Bontang masih belum maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ramadani (2016) dan Putri (2018) memberikan hasil bahwa kemandirian pemerintah masih rendah karena masih bergantung pada pemerintah pusat.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah:



Tabel 14. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan	Kriteria Kemampuan
2014	1.212.180.697.143	1.455.043.424.236	83,31%	Sangat Tinggi
2015	1.178.698.695.378	1.352.095.367.932	87,18%	Sangat Tinggi
2016	1.008.093.250.699	1.203.633.625.194	83,75%	Sangat Tinggi
2017	853.074.667.954	1.060.400.315.665	80,45%	Sangat Tinggi
2018	1.034.520.689.154	1.254.426.657.886	82,47%	Sangat Tinggi
Rata-rata			83,43%	Sangat Tinggi

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan Tabel 14 tingkat ketergantungan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 87,18%, sedangkan tingkat ketergantungan daerah terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 80,45% dalam hal ini menunjukkan walaupun terjadi peningkatan atau penurunan kota Bontang masih tergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan skala interval ketergantungan keuangan daerah menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 penilaian pada tahun 2014-2018 dapat dikatakan sangat tinggi, dikarenakan rata-rata rasio ketergantungan berada diatas 50%. Menurut Kasubbid Bapenda kota Bontang juga menyatakan bahwa “hal ini terlihat kota Bontang masih bergantung dana transfer dari pusat. Sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat”. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ramadani (2016) dan Putri (2018) memberikan hasil bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

5. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pajak daerah dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio efektifitas pajak daerah:



Tabel 15. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Rasio Efektifitas	Kriteria Kemampuan
2014	85.510.814.538	80.865.000.000	105,75%	Efektif
2015	56.524.423.482	52.930.000.000	106,79%	Efektif
2016	71.411.907.746	67.555.000.000	105,71%	Efektif
2017	82.122.896.197	74.240.000.000	110,62%	Efektif
2018	119.410.487.414	109.655.000.000	108,90%	Efektif
Rata-rata			107,55%	Efektif

(Sumber : BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan Tabel 15 penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 sampai 2018 telah sesuai target yang dianggarkan, dikarenakan rasio mencapai lebih dari 100%. Dilihat pada secara keseluruhan kota Bontang tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Peningkatan terjadi pada tahun 2017 sebesar 110,62% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 105,71% . Hasil perhitungan efektifitas pajak daerah kota Bontang pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dikatakan efektif, karena mencapai angka rata-rata sebesar 107,55%. Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) dan Ekasari (2018) bahwa secara umum pemerintah daerah sudah efektif dalam mengumpulkan pajak daerah.

6. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat perusahaan dalam kontribusi mendukung pendapatan daerah. Berikut adalah tabel hasil perhitungan derajat kontribusi BUMD daerah:

Tabel 16. Perhitungan Derajat Kontribusi BUMD kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Penerimaan Laba BUMD (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Derajat Kontribusi	Kriteria Kemampuan
2014	6.300.524.567	160.367.872.158	3,93%	Berkontribusi
2015	5.154.371.245	142.424.180.608	3,62%	Berkontribusi
2016	4.547.569.478	170.123.811.101	2,67%	Berkontribusi
2017	6.014.543.695	169.077.548.653	3,56%	Berkontribusi
2018	4.779.545.628	199.483.395.953	2,40%	Berkontribusi
Rata-rata			3,23%	Berkontribusi

(Sumber : BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan Tabel 16 rasio derajat kontribusi BUMD selama lima periode menunjukkan angka diatas 0%. Ditahun 2014 perusahaan daerah kontribusi sebesar 3,93%, ditahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dikarenakan perusahaan daerah berkontribusi sebesar 3,62% dan 2,67%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 3,56%, penurunan kembali terjadi ditahun 2018 sebesar 2,40%. Namun dari rata-rata keseluruhan mencapai angka sebesar 3,23%, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah telah berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bontang. Kontribusi Sosial Ekonomi dan Bisnis



BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 3,93%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 2,40%. Perusahaan BUMD di kota Bontang yang berkontribusi terhadap PAD antara lain: PDAM Tirta Taman, Perusda AUJ, dan PT. Bontang Migas Energi. Menurut Kasubbid Bapenda kota Bontang perusahaan BUMD di kota Bontang belum mampu memberikan deviden untuk peningkatan PAD dikarenakan proses operational perusahaan, termasuk dalam pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) dan Hakim (2018) bahwa secara umum perusahaan BUMD telah berkontribusi terhadap PAD pemerintah daerah.

7. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah digunakan untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel hasil perhitungan pertumbuhan belanja daerah:

Tabel 17. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Tahun t (Rp)	Realisasi Belanja Tahun t-1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah	Kriteria Kemampuan
2014	1.388.006.250.627	1.488.260.558.664	-6,74%	Negatif
2015	1.664.595.109.458	1.388.006.250.627	19,93%	Positif
2016	1.155.009.964.123	1.664.595.109.458	-30,61%	Negatif
2017	945.168.192.323	1.155.009.964.123	-18,17%	Negatif
2018	1.186.037.441.115	945.168.192.323	25,48%	Positif
Rata-rata			-2,02%	Negatif

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan tabel 17 pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan, hanya tahun 2015 dan 2018 yang mengalami peningkatan yaitu 19,93% dan 25,48% hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan kinerja keuangan belanja mengalami pertumbuhan negatif, dikarenakan persentase sebesar -30,61% dan -18,17%. Dilihat dari lima tahun ini analisis pertumbuhan daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -2,02%. Walaupun belanja sendiri mengalami penurunan, tidak bisa hanya dilihat dari tahun sebelumnya saja karena belanja sendiri mengikuti dari pendapatan kota Bontang. Apabila pendapatan mengalami kenaikan maka akan disesuaikan dengan belanjanya, dan jika belanja melampaui dari pendapatan sendiri maka akan terjadi defisit terhadap kota tersebut. Menurut salah seorang kasubbid Bapenda kota Bontang menyatakan bahwa “Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah”. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian yang Sosial Ekonomi dan Bisnis



dilakukan Assidiqi (2014) dan Putri (2018) memberikan hasil bahwa secara umum pertumbuhan belanja daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif.

8. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Berikut adalah tabel hasil perhitungan analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah:

Tabel 18. Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Daerah	Kriteria Kemampuan
2014	936.003.206.043	1.388.006.250.627	67,44%	Mendominasi
2015	1.070.855.604.359	1.664.595.109.458	64,33%	Mendominasi
2016	886.073.222.723	1.155.009.964.123	76,72%	Mendominasi
2017	714.033.656.799	945.168.192.323	75,55%	Mendominasi
2018	850.803.447.061	1.186.037.441.115	71,73%	Mendominasi
Rata-rata			71,15%	Mendominasi

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 18 belanja operasi terhadap total belanja ditahun 2014 sebesar 67,44% dan ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 76,72%, namun pada tahun 2015, 2017, dan 2018 mengalami penurunan sebesar 64,33%, 76,72%, dan 71,73%. Secara umum tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dikatakan sebagian besar dana belanja 69 daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Berdasarkan tabel 4.9 di atas juga menunjukkan rata-rata belanja operasi mencapai angka 71,15% dari keseluruhan belanja. Menurut Mahmudi (2016:162) pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 76,72%, sedangkan rasio belanja operasi terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 64,33%. Belanja operasi dengan alokasi rata-rata sebesar 71,15% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Dari komponen belanja operasi tersebut, belanja yang paling menyerap APDB kota Bontang adalah belanja pegawai dan belanja barang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) Karlina (2017) memberikan hasil bahwa secara umum belanja operasi lebih mendominasi terhadap total belanja.

9. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini berguna untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Analisis ini bersifat menambah aset lainnya memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, selain itu juga tidak bersifat rutin. Pada



umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan analisis belanja modal terhadap total belanja daerah:

Tabel 19 . Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Daerah	Kriteria Kemampuan
2014	452.003.044.584	1.388.006.250.627	32,56%	Tidak Mendominasi
2015	591.621.559.899	1.664.595.109.458	35,54%	Tidak Mendominasi
2016	247.728.703.313	1.155.009.964.123	21,45%	Tidak Mendominasi
2017	221.490.254.924	945.168.192.323	23,43%	Tidak Mendominasi
2018	333.742.250.054	1.186.037.441.115	28,14%	Tidak Mendominasi
Rata-rata			28,23%	Tidak Mendominasi

(Sumber : BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 19, kinerja keuangan belanja daerah kota Bontang tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Dari keseluruhan belanja modal total belanja habis digunakan berkisar antara 21,45% sampai 35,54% dalam lima tahun. Dimana hasil tersebut dapat dikatakan belanja modal pada kota Bontang untuk investasi baik Secara umum dapat dikatakan sebagian kecil dana belanja dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata belanja modal sebesar 28,23% dari keseluruhan belanja. Rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 35,54%, sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 21,45%. Belanja modal dengan alokasi rata-rata sebesar 28,23% digunakan untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Dari komponen belanja modal tersebut, belanja yang paling menyerap APBD kota Bontang adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiqi (2014) Karlina (2017) memberikan hasil bahwa secara umum belanja modal tidak mendominasi terhadap total belanja.

10.Rasio Efisiensi Belanja

Rasio analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berikut adalah tabel hasil perhitungan analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah:

Tabel 20. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah kota Bontang tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja Daerah	Kriteria Kemampuan
2014	1.388.006.250.627	1.709.514.270.929	81,19%	Efisien
2015	1.664.595.109.458	1.952.027.334.297	85,28%	Efisien
2016	1.155.009.964.123	1.347.204.417.761	85,73%	Efisien
2017	945.168.192.323	1.096.221.065.820	86,22%	Efisien



2018	1.186.037.441.115	1.380.195.674.446	85,93%	Efisien
Rata-rata			84,87%	Efisien

(Sumber: BPKAD Kota Bontang (data diolah, 2020))

Berdasarkan tabel 22 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kota Bontang dari segi efisiensi belanja selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018 telah melakukan kinerja yang cukup efisien. Rasio efisiensi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 85,28%, sedangkan rasio belanja terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 85,73%. Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 semua angka pada efisiensi belanja menunjukkan angka dibawah 100% dan rata-rata efisiensi mencapai angka 84,87%, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja daerah kota Bontang untuk lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Assidiq (2014) Karlina (2017) memberikan hasil bahwa secara umum kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari efisiensi belanja daerah dapat dikatakan efisien. hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 100% atau tidak melebihi anggaran belanja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pendapatan daerah kota Bontang dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah pemkot Bontang selama tahun 2014-2018 kinerja keuangan pendapatan daerah mengalami peningkatan ditahun 2018, namun secara umum mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata presentase pertumbuhan mencapai angka -1,69%. Maka hipotesis diterima
2. Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari derajat desentralisasi daerah pemerintah kota Bontang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 15,94%, namun umum dapat dikatakan kurang baik. dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Bontang adalah Rendah Sekali yaitu sebesar 13,37%, sedangkan jika dilihat dari pola hubungan di Kota Bontang adalah instruktif. Maka hipotesis diterima.
3. Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Bontang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 19,82%, namun secara umum dapat dikatakan rendah sekali dikarenakan rata-rata persentase sebesar 16,26%. Maka hipotesis diterima.
4. Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari ketergantungan keuangan daerah pemerintah kota Bontang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 87,18%, secara umum dapat dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari rasio yang berada diatas 50%, dan rata-rata sebesar 83,43%. Maka hipotesis diterima.



5. Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari efektifitas pajak daerah pemerintah kota Bontang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 110,62%, secara umum secara umum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari keseluruhan perhitungan yang mencapai angka rata-rata sebesar 107,55%. Maka hipotesis diterima
6. Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari derajat kontribusi BUMD pemerintah kota Bontang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 3,93%, secara umum dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari rasio yang berada diatas 0% dan angka rata-rata yang dicapai sebesar 3,23%. Maka hipotesis diterima.
7. Kinerja keuangan belanja daerah kota Bontang dilihat dari pertumbuhan belanja daerah selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan ditahun 2018 sebesar 25,48%, namun secara umum dapat dikatakan mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,02%. Maka hipotesis diterima.
8. Kinerja keuangan belanja daerah kota Bontang dilihat dari belanja operasi terhadap total belanja daerah selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan ditahun 2016 sebesar 76,72%, dilihat keseluruhan tahun 2014–2018 berfluktuasi tetapi jika dilihat secara umum dapat dikatakan sebagian besar dana belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata belanja operasi sebesar 71,15% terhadap total belanja. Maka hipotesis diterima
9. Kinerja keuangan belanja daerah kota Bontang dilihat dari belanja modal terhadap total belanja daerah selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan terbesar ditahun 2015 sebesar 35,54%, namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata belanja modal sebesar 28,23% terhadap total belanja. Komponen belanja modal yang paling menyerap APBD kota Bontang adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2017, Maret 2). *Informasi Keuangan Daerah*. Depetik Desember 4, 2019, dari bontangkota:<http://www.bontangkota.go.id/2017/03/02/informasi-keuangan-daerah/6/>
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991) . *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.



Ekasari, Leli.(2018). “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2016”. Jurnal. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Hakim, Mochammad Faishal. (2018). “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Karlina, A. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD kota Surabaya Tahun 2012-2015”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3)

Putri, Ayu Atika. (2018). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016”. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 3. STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Ramadani, Rani Febri, Elfreda Aplonia Lau & Suyatin. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Samarinda”. Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

